

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Triple Bottom Line Accounting*

Pada konsep pembangunan berkelanjutan, dunia usaha tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* (SBL) atau nilai perusahaan (*corporate value*) dilihat dari segi kondisinya (*financial*) saja. Dikutip dalam Elkington (1998) memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* (TBL atau 3BL) atau juga 3P – *People, Planet and Profit*. Secara singkat, ketiganya merupakan pilar yang mengukur nilai kesuksesan suatu perusahaan dengan tiga kriteria: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pendekatan ini telah banyak digunakan sejak awal tahun 2007 seiring perkembangan pendekatan akuntansi biaya penuh (*full cost accounting*) yang banyak digunakan oleh perusahaan sektor publik. Istilah *triple bottom line* semakin dipahami oleh dunia usaha. Sekarang dunia usaha tidak hanya memperhatikan laporan keuangan perusahaan saja (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan sosial dan lingkungan hidup yang biasa disebut *triple bottom line* (TBL). Sinergi ketiga elemen tersebut merupakan kunci dari konsep Laporan Berkelanjutan.

Pengertian TBL dikutip Putra dan Larasdiputra (2019) adalah intisari dari keberlanjutan dengan mengukur dampak dari kegiatan organisasi di dunia, termasuk profitabilitas dan pemegang saham, sosial, masyarakat, dan lingkungan. Sedangkan Aristini dan Semara (2019) menyatakan bahwa Konsep (TBL) diharapkan mampu berkontribusi untuk ikut serta membangun masyarakat dan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya serta tidak hanya berorientasi pada laba.

Nurhidayat, Junaid dan Kamase (2020) menjelaskan keterkaitan mengenai ketiga aspek TBL yaitu: *Profit*, merupakan pendapatan tambahan yang digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. *Profit* dapat dikatakan sebagai ideologi perusahaan, dalam arti bahwa kelangsungan hidup

perusahaan tidak akan tercapai tanpa ada laba. Akan tetapi dalam perkembangannya lingkungan bisnis semakin menyadari bahwa laba bukan suatu bagian parsial sehingga laba sebagai pilar harus dikaitkan dengan pilar yang lainnya. Aspek berikutnya adalah People, masyarakat yang menjadi salah satu unsur pendukung yang menentukan manusia berhubungan dengan sentuhan humanisme yang dikelola untuk perusahaan, manusia juga berkaitan dengan variabel-variabel sosial contohnya seperti tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan dan Planet yang merupakan lingkungan yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan perusahaan,. Pilar selanjutnya yaitu lingkungan mencerminkan simbiosis dengan perusahaan contohnya berkaitan dengan kualitas udara, air, dan biodiversity.



Gambar 2.1: Konsep Triple Bottom Line

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan memegang peran penting dalam praktik bisnis perusahaan. Teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara principal dan agen. Principal sebagai pemegang saham dan agen sebagai manajer. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan (*agency theory*) sebagai kontrak antara satu atau lebih principal (pemilik) dengan agent (manajer). Teori keagenan memaparkan bahwa manajer perusahaan dengan profit yang lebih tinggi kemungkinan akan melakukan pengungkapan yang lebih luas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

pribadi, seperti promosi jabatan dan kompensasi. Sebaliknya, apabila profit perusahaan menurun, manajer akan cenderung mengurangi informasi yang diungkapkan dengan tujuan untuk menyembunyikan alasan-alasan mengapa profit perusahaan mengalami penurunan Jensen dan Meckling (1976).

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Supriyono (2018) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Teori keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Konsep *Agency Theory* menurut Scott (2015) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal. Hubungan kedua pihak tersebut diharapkan terjadi harmonisasi peran yang dikenal sebagai *corporate governance*, Mulyadi dan Anwar (2015) mendefinisikan *corporate governance* sebagai mekanisme yang mengontrol sebuah perusahaan sehingga dapat berjalan secara efektif dalam memenuhi kedua kepentingan pemangku. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa teori keagenan (*agency theory*) adalah model ataupun rancangan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam terjadi potensi konflik kepentingan.

2.1.3 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menyatakan bahwa pihak pengirim informasi memberikan sebuah isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak investor sebagai penerima. Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat

diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Brigham dan Houston (2015) menyatakan teori sinyal merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah.

2.1.4 Teori Legitimasi

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tentu harus memperhatikan nilai-nilai dan norma yang ada di lingkungan dimana perusahaan tersebut berada agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat (Deegan, 2004). Menurut Syakirli, dkk., (2019:279), perusahaan memerlukan pengakuan dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat agar mampu memperthankan kelangsungan hidupnya atau hal ini biasa disebut dengan legitimasi. Perusahaan dianggap dapat membuktikan rasa tanggung jawabnya dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut dengan tanggung jawab sosial, yang nantinya terdapat dalam pengungkapan sustainability reporting (Noerkholiq dan Muslih, 2021). Dengan teori legitimasi ini, perusahaan dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan memperhatikan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosialnya, agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Karena perusahaan tau, kelangsungan hidup dari perusahaan juga bergantung pada pemangku kepentingan yang ada di sekitar lingkungan perusahaan.

2.1.5 *Global Reporting Initiative*

Global Reporting Initiative (GRI) didirikan pada tahun 1997 oleh sejumlah perusahaan dan organisasi yang tergabung dalam Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) dengan misi mengembangkan pedoman pelaporan berkelanjutan yang berlaku secara global

untuk memberi petunjuk pembuatan laporan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, pada awalnya pedoman ini hanya dipakai oleh beberapa perusahaan tetapi saat ini telah berkembang bahkan hingga lembaga non profit pemerintah atau non-pemerintah.

Organisasi GRI berisi perwakilan dari beberapa perusahaan di berbagai negara, LSM dan badan PBB United Nations Environment Program (UNEP). Tahun 2000, untuk pertama kalinya GRI mempublikasikan guideline nya diikuti publikasi untuk expanded version pada bulan Agustus 2002. Saat ini tidak kurang dari 460 perusahaan dari 45 negara mengadopsi total atau sebagian dari GRI untuk digunakan sebagai sustainability report guideline pada perusahaannya.

Laporan berkelanjutan yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan manajemennya. Laporan dapat digunakan untuk tujuan berikut:

1. Perbandingan dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif mereka.
2. Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan.
3. Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan diantara berbagai organisasi dalam waktu tertentu.

Setelah dibentuk, GRI melahirkan panduan laporan keberlanjutan untuk pertama kalinya pada tahun 2000. GRI kemudian melakukan revisi terhadap panduan laporan keberlanjutan dalam kurun waktu tertentu dan pada umumnya menggunakan penamaan atau pengkodean yang spesifik. GRI G2 atau versi 2 diterbitkan pada tahun 2002. Kemudian GRI G3, GRI G3.1, GRI G4 diluncurkan berurutan pada tahun 2006, 2011, dan 2013. Pada tahun 2015, GRI membentuk *Global Sustainability Standard Board* (GRI GSSB) yang

secara spesifik bertugas menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Menjelang kuartal keempat tahun 2016, GRI GSSB mulai memperkenalkan GRI Standards yang kemudian diluncurkan di Indonesia pada tahun 2017. GRI Standards akan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Dalam Standar GRI terdapat dua kategori pengungkapan, yaitu Standar Universal dan Standar Topik Spesifik. Pengungkapan standar universal panduan bagi pelapor dalam menggunakan Standar, melaporkan informasi kontekstual organisasi yang relevan, dan melaporkan cara pengelolaan topik materialnya. Standar topik spesifik digunakan untuk melaporkan informasi tentang dampak material organisasi terkait topik ekonomi, lingkungan dan sosial. Dari masing-masing topik tersebut dijelaskan mengapa aspek tersebut material, bagaimana dampaknya dikelola dan bagaimana pengelolaan topik ini dievaluasi. Standar GRI terlebih dulu menguji isu-isu material untuk dilaporkan. Untuk topik-topik yang dianggap material, organisasi dapat memberikan penjelasan naratif tentang alasan atau latar belakang suatu topik dianggap material (penting), tempat terjadinya dampak atau batasan topik, dan cara perusahaan mengelola dampak tersebut. GRI memberikan pilihan dalam menyiapkan laporan sesuai Standar GRI yakni Inti dan Komprehensif. Inti berarti laporan berisi informasi minimal yang diperlukan untuk memahami hakikat organisasi, topik materialnya, dampak terkait, dan bagaimana hak tersebut dikelola. Sedangkan Komprehensif mewajibkan pengungkapan tambahan tentang strategi, etika dan integritas, serta tata kelola organisasi, mewajibkan melaporkan seluruh pengungkapan topik spesifik untuk setiap topik material yang dicakup dalam Standar GRI.

Penggunaan GRI Standards mungkin tidak akan berdampak signifikan bagi perusahaan yang telah membuat laporan keberlanjutan berbasis GRI G4. Secara umum, isi keduanya tidak jauh berbeda. Hanya ada 2 indikator spesifik yang “*discontinued*” dan total 42 yang direvisi. Selbihnya mengalami perubahan minor atau perubahan klasifikasi indikator. Baik GRI G4 maupun GRI Standards juga memiliki penekanan yang sama. Keduanya sama-sama memperhatikan isu kesetaraan gender dan keterlibatan *value*

chain dalam setiap aspek keberlanjutan. Prinsip-prinsip laporan keberlanjutan juga masih sama. *Materiality* dan *boundary* masih menjadi landasan dalam menentukan isi laporan. Kemudian, GRI G4 dan GRI Standards juga tetap mendorong proses *assurance* oleh pihak independen atas laporan keberlanjutan yang diterbitkan. Pilihan *core* dan *comprehensive* dalam menyusun laporan juga masih berlaku. GRI Standards mengusung perubahan signifikan dalam hal struktur dokumen dan penggunaan bahasa. Pertama, GRI Standards menggunakan skema dokumen modular dengan total 36 modul. Dengan demikian, setiap modul dapat ditambah, dikurangi atau diubah kapan saja sesuai dengan dinamika aspek keberlanjutan. Misalnya, jika GRI ingin menambah indikator pada topik energi, maka GRI akan menerbitkan GRI 302-6, GRI 302-7 dan seterusnya.

Perkembangan standar GRI dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 : Perkembangan Standar GRI



Dikutip dari <https://www.globalreporting.org/standards/media/g4-to-the-gri-standards-disclosures-track-changes.pdf> Perbedaan yang menonjol adalah dari GRI 4 menjadi GRI Standards adalah adanya perubahan signifikan terkait dengan struktur dokumen dan penggunaan bahasa. Pertama, GRI Standards menggunakan skema modular dengan total 36 modul. Dengan begitu, setiap modul dapat ditambah, dikurangi atau diubah kapan saja sesuai dengan dinamika aspek keberlanjutan. Yang kedua, GRI Standards mengubah penggunaan kata dan gaya bahasa agar lebih mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan. Misalnya penggunaan kata *disclosure* dibandingkan dengan *indicator*, menggunakan kata *topic* daripada *aspect* dan menggunakan kata *management approach* dibandingkan dengan menggunakan istilah *disclosure of management approach* atau *DMA*. Hal lainnya adalah penempatan pembahasan mengenai *management approach* pada GRI 103 bersama dengan pembahasan tentang *materiality* dan *boundary* yang pada

sebelumnya disebut sebagai DMA dibahas khusus dan tersebar pada berbagai indikator sehingga menyulitkan bagi pengguna untuk memenuhi ketentuan DMA ini pada setiap indikator. Sedangkan untuk struktur penulisan, GRI Standards dengan jelas membedakan klausul yang harus dipenuhi (requirements) dan yang direkomendasikan (Recommendations) yang bertujuan agar memudahkan penyusun laporan keberlanjutan untuk menentukan prioritas penulisan data dan informasi pada hal-hal requirements terlebih dahulu.

Dikutip dari <https://majalahcsr.id/peluncuran-gri-standards-2018-membaca-arrah-akuntabilitas-masa-depan/2/> berikut perbedaan dari GRI 4 menjadi GRI Standar:

Tabel 2.1: Perbedaan GRI 4 dan GRI Standard

Perihal	GRI 4	GRI Standard
Dokumen	Terbagi atas dua buku: 1. Reporting Principles and Standard Disclosure. 2. Implementation Manual	Modular, terdiri dari; tiga modul standar universal: · GRI 101 Foundation · GRI 102 General Disclosure · GRI 103 Management Approach dan 33 modul topik spesifik yang terangkum dalam 3 pengkodean modul utama: · GRI 200 Economy · GRI 300 Environment · GRI 400 Social
Pengungkapan Pendekatan Manajemen	Disclosure of Management Approach (DMA) dijelaskan dalam G4-DMA dan masing-masing indikator secara spesifik	Pendekatan manajemen dijelaskan hanya pada GRI 103, bersama dengan pembahasan <i>material topic</i> dan <i>boundary</i> .
Format Penulisan	Menggunakan kata “ <i>indicator</i> ”; pembahasan aspek spesifik hanya fokus pada indikator dan <i>guidance</i> ; tidak membedakan antara yang wajib disajikan dalam laporan dan yang	Menggunakan kata “ <i>disclosure</i> ” atau “pengungkapan”; dan setiap pembahasan <i>disclosure</i> menjelaskan antara: · <i>requirements</i> / harus dilaporkan · <i>recommendations</i> / tidak wajib, tapi sebaiknya dilaporkan · <i>guidance</i> / referensi lain yang

Perihal	GRI 4	GRI Standard
	direkomendasikan.	dapat digunakan untuk menyusun laporan
Proses Revisi	Revisi dilakukan dengan menerbitkan versi terbaru, misalnya menerbitkan GRI G4 untuk merevisi GRI G3.1	Karena modular, revisi dapat dilakukan lebih fleksibel dengan mengubah / menambah / mengurangi standar tertentu yang dituju atau yang relevan. Tidak perlu membuat versi baru.
Isi	58 General Standard Disclosure G4 DMA 90 Specific Standard Disclosure	60 General Disclosure 9 Management Approach 82 Specific Disclosure 2 indikator GRI G4 dihapus (G4-EN27 dan G4-EN30) 1 indikator G4 (G4-EN31) direvisi dan dicantumkan pada beberapa <i>specific disclosure</i>

2.2 Hubungan Antar Variabel

1. Profitabilitas dan Pengungkapan GRI

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun penggunaan modal. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasional. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi kinerja perusahaan tersebut dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki profit lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk mendorong mengungkapkan informasi lebih rinci dalam laporan tahunan dalam rangka menunjukkan kinerja keuangan kepada publik.

2. Leverage dan Pengungkapan GRI

Rasio Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar suatu perusahaan dibiayai dengan utang. Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi mengakibatkan pengawasan yang tinggi dilakukan oleh debtholders terhadap aktivitas perusahaan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debt holders (Zanirah, 2016). Dalam penelitian ini variabel leverage diproksikan oleh Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk melihat utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan debitur untuk perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui jumlah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang perusahaan. Semakin tinggi rasio leverage menunjukkan komposisi utang semakin besar dibanding dengan total modal sendiri dan menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan

3. Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan GRI

Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan (Adawiyah, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan terkait dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa tingkat pengungkapan perusahaan akan semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan tidak hanya berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela tetapi juga terhadap tingkat pengungkapan wajib (Ayu, 2010).

2.3 Pengembangan Hipotesis

Menurut Watts dan Zimmerman (1986), perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan, termasuk dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut Belkaouli dan

Karpik (1989) dalam Suryono (2011) dan dalam Nisrina Puji Harto (2014). Keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial, akan diikuti pengeluaran untuk pengungkapan yang dapat menurunkan pendapatan. Artinya leverage memberikan sinyal yang buruk bagi para stakeholder.

Semakin besar perusahaan akan berdampak kepada semakin tingginya tingkat GRI. Hal ini juga membuktikan bahwa perusahaan besar cenderung memberikan informasi yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan teori agensi bahwa perusahaan besar yang memiliki biaya agensi yang lebih besar akan mengungkapkan informasi lebih lanjut untuk memotong biaya agensi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam penelitian ini dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H0₁: Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan GRI.

Ha₁: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan GRI.

H0₂: Leverage berpengaruh berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan GRI.

Ha₂: Leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan GRI.

H0₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan GRI.

Ha₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan GRI.

H0₄: Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan GRI.

Ha₄: Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan GRI.

2.4 Review Penelitian Terdahulu

Sekar Prabaningrum dan Yulinda Devi Pramita (2019) melakukan penelitian untuk menguji Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report, Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Namun, variabel ukuran perusahaan, leverage, aktivitas perusahaan, dewan direksi, dan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sustainability reporting.

Dewi (2019) melakukan penelitian untuk menguji Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Serta Dampaknya Kepada Nilai Perusahaan Hasil pengujian membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.

Safitri dan Saifudin (2019) melakukan penelitian untuk menguji Implikasi Karakteristik Perusahaan dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit dan governance committee berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Sedangkan profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan dan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan.

Krawczyk (2019) melakukan penelitian mengenai CSR Reporting Standards: Implementation in Polish Enterprises. Hasil menunjukkan bahwa Pertumbuhan pelaporan non-keuangan dapat dikonfirmasi setelah pemberlakuan peraturan Directive 2014/95 / EU. Aturan ini tidak memaksakan struktur laporan ini tetapi menunjukkan konten informasi yang minimal yang harus diungkapkan. Standar Informasi Non-Keuangan (SIN) nasional atau standar GRI internasional memandu penyusunan laporan.

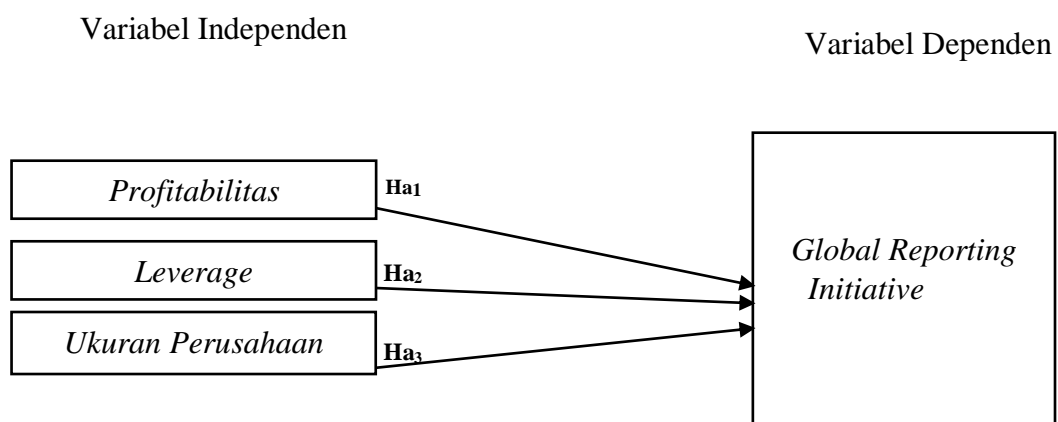
Raucci dan Tarquinio (2020) melakukan penelitian mengenai *Sustainability Performance Indicators and Non-Financial Information Reporting. Evidence from the Italian Case*. Hasil menunjukkan bahwa masing-masing kategori indikator kinerja (ekonomi, lingkungan, dan sosial)

sebagian besar digunakan oleh perusahaan sampel pada tahun 2012 dan kurang diungkapkan oleh perusahaan yang sama pada tahun 2017.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian ini menggunakan model kerangka berpikir di bawah ini untuk menjelaskan fenomena masalah yang terjadi. Berikut ini visualisasi kerangka pemikiran penelitian ini.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang dibentuk dalam penelitian ini:



Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran